
KOMUNALISME DAN POPULISME MASYARAKAT INDONESIA

Temuan Survei 18-28 Juli 2009



Jalan Lembang Terusan No. D 57

Menteng, Jakarta 10340,

Telp. (021) 3919582

Website: www.lsi.or.id, Email: info@lsi.or.id

LATAR BELAKANG

1. Saat kampanye pemilihan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), masyarakat disuguhi perdebatan antara kebijakan ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan. Oleh banyak pihak, pengkutuban konsep ekonomi ke dalam dua istilah ini dipandang tidak tepat, karena sejak dulu pemerintah Indonesia tidak pernah menerapkan salah satu dari keduanya. Bahkan beberapa kalangan memandang neo-liberal sebagai istilah yang tidak jelas dalam ilmu ekonomi. Meskipun demikian, perdebatan ini menyiratkan sebuah dikotomi antara kebijakan yang berorientasi populis dan yang menekankan pasar. Lebih jauh lagi, keduanya merepresentasikan pandangan yang menekankan kepentingan komunal dan kebebasan individu. Oleh pesaingnya, rejim SBY dinilai mengutamakan pasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat miskin.

LATAR BELAKANG

2. Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga menyaksikan perseteruan keagamaan yang berpangkal pada dikotomi antara kebebasan beragama atau berkeyakinan dan keharusan mengikuti institusi agama yang mapan. Kasus yang paling menonjol adalah penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah dan penangkapan kelompok Eden, yang keduanya dianggap sesat oleh otoritas agama Islam, yakni MUI. Tidak seperti dalam kebijakan ekonomi, pemerintah dipandang lebih membela institusi agama yang mapan dengan melarang Ahmadiyah sambil membawa kelompok Eden ke pengadilan. Dalam hal ini, rejim SBY dianggap mengabaikan hak-hak individu untuk memilih keyakinan keagamaan yang dijamin dokumen hukum internasional.

LATAR BELAKANG

3. Sebenarnya perdebatan antara kepentingan individu dan kelompok sudah muncul jauh sebelum kejadian-kejadian ini mengemuka. Sejak Orde Lama masyarakat sudah terbiasa mendengar berbagai dikotomi yang diproyeksikan dari pertentangan antara kebebasan individu dan keharusan sosial. Namun demikian, pemerintah sebelumnya selalu menekankan pentingnya harmoni sosial dengan memberi tempat yang lebih tinggi pada tuntutan komunal. Kecenderungan ini tercermin dalam berbagai kebijakan, seperti negara kekeluargaan, ekonomi koperasi, atau musyawarah mufakat. Baik Orde Lama dan Orde Baru yang non-demokratis sama-sama menekankan pentingnya menjunjung kepentingan masyarakat banyak dibandingkan individu warga.

LATAR BELAKANG

4. Warisan rejim lama ini seharusnya mulai surut sejalan dengan perkembangan pendidikan, urbanisasi, industrialisasi dan terakhir demokratisasi. Khususnya di perkotaan, individu sudah seharusnya tidak lagi terbelenggu oleh tradisi serta institusi sosial dan keagamaan. Arus ini diperkirakan semakin kuat dengan munculnya demokrasi, dimana individu berkesempatan luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

LATAR BELAKANG

5. Melihat kuatnya arus perubahan yang terjadi selama 10 tahun belakangan, harapan untuk terjadinya pergeseran nilai-nilai masyarakat cukup beralasan. Sistem ekonomi kita sudah semakin terbuka, begitu juga sistem politik dan arus informasi lainnya. Meskipun demikian, aspirasi politik dan sosial untuk terus menekankan kepentingan komunal melalui semboyan-semboyan populis juga tidak bisa disepelekan. Dalam beberapa hal, rejim SBY sendiri juga mengadopsi kerangka pemikiran ini, seperti tercermin dalam kebijakan agama dan pendidikan, yakni pendidikan gratis. Untuk mengevaluasi sejauhmana sudah terjadi pergeseran dalam masyarakat terhadap orientasi nilai-nilai komunal dan individual, berikut temuan LSI:

METODOLOGI

- Survei opini publik nasional dengan populasi: semua penduduk Indonesia yang punya hak pilih.
- Sampel: Sampel asal sebanyak 1270 dipilih dengan teknik multistage random sampling. Sampel akhir yang yang dapat dianalisis, respond rate (berhasil diobservasi) sekitar: 1.265 responden (sangat baik). Dengan jumlah sampel ini, dengan memasukkan faktor cluster dalam sampling design, margin of error sebesar +/-2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
- Wawancara dilakukan tatap muka.
- Kontrol kualitas: 50% responden yang dipilih secara random dimonitor dan diverifikasi lewat telpon (setelah wawancara selesai, pewawancara lapor ke supervisor untuk memastikan telah dilakukan wawancara dengan responden dimaksud); dan 20% secara random dilakukan spot check/didatangi kembali secara langsung oleh supervisor.
- Waktu wawancara lapangan 18-28 Juli 2009.

Prosedur Multistage Random Sampling dalam pemilihan sampel

- Stratifikasi 1 = populasi pemilih dikelompokkan menurut provinsi dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing provinsi.
- Stratifikasi 2: populasi pemilih dikelompokkan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan.
- Stratifikasi 3: populasi pemilih dikelompokkan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).

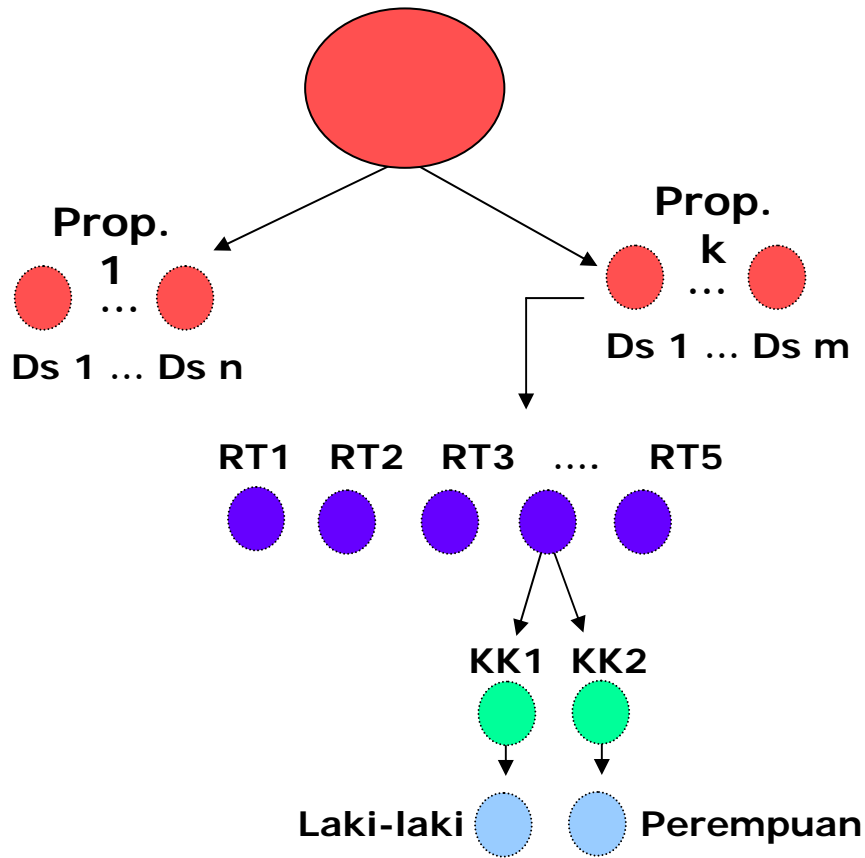
Lanjutan ...

- Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit. Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki-laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di Gorontalo 1%, maka kalau di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan maka di Gorontalo dipilih hanya 1 desa/kelurahan, dst.
- Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masing-masing RT akan dipilih secara random dua Keluarga.

Lanjutan ...

- Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, didaftar populasi keluarga, dan dipilih secara random 2 keluarga.
- Cluster 4: Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan menjadi responden di antara mereka.
- Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki.

Metodologi Survei



Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat Propinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

VALIDASI SAMPEL

PROFIL DEMOGRAFI SAMPEL LSI DIBANDING POPULASI

KATEGORI	SAMPEL	BPS
JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	50.0	50.0
PEREMPUAN	50.0	50.0
DESA-KOTA		
DESA	59.8	59.0
KOTA	40.2	41.0

KATEGORI	SAMPEL	BPS
AGAMA		
Islam	87.0	87.0
Kristen	10.5	10.0
Lainnya	2.5	2.0
ETNIS		
Jawa	43.4	41.6
Sunda	15.9	15.4
Melayu	5.4	3.4
Madura	3.2	3.4
Bugis	3.4	2.5
Betawi	1.9	2.5
Minang	2.7	2.7
Lainnya	23.6	28.5

PROFIL DEMOGRAFI SAMPEL LSI DIBANDING POPULASI

KATEGORI	SAMPEL	BPS
PROPINSI		
NAD	1.7	1.9
SUMATERA UTARA	5.4	5.3
SUMATERA BARAT	1.9	2.1
RIAU	2.1	2.2
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.0	3.2
BENGKULU	0.7	0.8
LAMPUNG	3.1	3.4
BANGKA BELITUNG	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.7	0.6
DKI JAKARTA	4.4	3.5
JAWA BARAT	17.2	17.4
JAWA TENGAH	15.0	15.2
DI YOGYAKARTA	1.6	1.6
JAWA TIMUR	17.0	16.7
BANTEN	4.1	4.1

KATEGORI	SAMPEL	BPS
PROPINSI		
BALI	1.5	1.5
NTB	1.9	2.0
NTT	1.6	2.0
KALBAR	1.8	1.9
KALTENG	0.9	0.9
KALSEL	1.5	1.5
KALTIM	1.4	1.4
SULUT	1.0	1.0
SULTENG	1.0	1.1
SULSEL	3.3	3.5
SULTRA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULBAR	0.4	0.5
MALUKU	0.6	0.6
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PUPUA	1.2	0.9
IRJABAR	0.3	0.3

SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL

Pengukuran

Untuk mengukur kecenderungan komunalisme-individualisme masyarakat, survei ini mengajukan dua pernyataan yang bersifat dikotomis. Responden diminta memberikan nilai berdasarkan skala 1 sampai 10 terhadap dua pernyataan tersebut. Nilai 1 menunjukkan keberpihakannya yang kuat terhadap salah satu pernyataan, dan nilai 10 menunjukkan keberpihakannya pada pernyataan yang berlawanan. Adapun nilai 5 menunjukkan sikap responden yang berada di antara dua ekstrim pertanyaan tersebut.



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL: NILAI AGAMA – KEBEBASAN INDIVIDU

109. Ada dua kelompok di masyarakat. Kelompok pertama berpendapat bahwa nilai-nilai agama, moral dan tradisi harus diutamakan dan diperjuangkan dibanding kebebasan individu untuk memilih keyakinan masing-masing dan saling menghormati. Kelompok kedua berpendapat sebaliknya. Jika skala 10 artinya: "Setuju Kebebasan Individu" dan skala 1 artinya "Nilai Agama harus diperjuangkan." Dari skala 1 – 10 berikut ini, di mana Ibu/Bapak meletakkan posisi ibu/bapak sendiri:

Nilai Agama

1

Skor rata-rata

3.83

Kebebasan Individu

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL : RAMAH LINGKUNGAN - PERTUMBUHAN EKONOMI

110. Ada dua pendapat dalam masyarakat. Yang pertama menyatakan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana agar ekonomi rakyat lebih baik meskipun terpaksa harus merusak lingkungan. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pelestarian lingkungan lebih penting dari pada kemajuan ekonomi rakyat, dan karena itu tidak boleh merusak lingkungan dengan alasan memperbaiki kehidupan ekonomi. Jika skor makin mendekati 1 adalah semakin pro pelestarian lingkungan meskipun menghambat kemajuan ekonomi rakyat, dan mendekati skor 10 menunjukkan makin pro dengan perbaikan ekonomi rakyat meskipun harus merusak lingkungan, di mana ibu/bapak kira-kira menilai sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah tersebut:

Ramah Lingkungan

1

Skor rata-rata

4.72

Pertumbuhan Ekonomi

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL : Meningkatkan Pajak – Mengurangi Pajak

111. Di masyarakat ada dua pendapat yang bertentangan. Yang pertama mengatakan “Kita harus meningkatkan pelayanan kepentingan masyarakat umum meski dengan menaikkan pajak dari masyarakat”. Pendapat sebaliknya mengatakan: “Kita harus mengurangi pajak meski dengan resiko pelayanan bagi kepentingan masyarakat umum kurang baik.” Jika angka 1 menunjukkan semakin setuju dengan perbaikan pelayanan kepentingan umum meskipun harus menaikkan pajak masyarakat, dan 10 menunjukkan semakin setuju dengan mengurangi pembayaran pajak dari masyarakat meskipun pelayanan kepentingan masyarakat umum menjadi kurang baik. Di mana posisi Ibu/Bapak dalam dua pandangan yang bertentangan tersebut?

**Meningkatkan pajak
untuk memperbaiki
pelayanan masyarakat
umum**

1

Skor rata-rata

4.19

**Mengurangi pajak
meski harus mengurangi
pelayanan masyarakat
umum**

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Pemerataan Pendapatan – Bekerja lebih keras lebih banyak pendapatan

112. Di masyarakat ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Yang pertama menekankan lebih pentingnya pemerataan pendapatan secara seimbang di antara warga. Kelompok kedua berpendapat, siapa yang bekerja keras maka ia harus menjadi lebih banyak pendapatannya. Bila angka 1 menunjukkan semakin cenderung pada pendapat yang pertama, dan angka 10 cenderung pada pendapat kedua, maka di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri?

**Pemerataan
pendapatan**

Skor rata-rata

6.22

**Yang bekerja lebih
keras harus
lebih banyak
pendapatannya**

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Hukum dan keteraturan – Kebebasan Sipil

113. Ada dua pendapat dalam masyarakat. Yang pertama lebih menekankan ketertiban dan penegakan hukum. Yang kedua lebih menekankan pentingnya kebebasan individu warga. Angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

**Setuju hukum &
Keteraturan**

Skor rata-rata

3.30

**Setuju
Kebebasan Sipil**

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Negara tetap memiliki perusahaan – Menjual perusahaan Negara Kepada Rakyat

114. Ada dua pendapat dalam masyarakat. Yang pertama berpendapat sebaiknya negara kita menjual perusahaan-perusahaan milik negara kepada masyarakat. Yang kedua sebaliknya agar negara tetap memiliki perusahaan-perusahaan negara tersebut. Angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

**Negara tetap
Memiliki
perusahaan**

Skor rata-rata

3.42

**Menjual perusahaan
negara kepada
masyarakat**

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Hindari Persaingan – Harus bersaing

115. Ada dua pendapat di masyarakat. Pendapat pertama menyatakan “Kita harus kerja keras dan saling bersaing sesama teman sekalipun sehingga maju”. Pendapat kedua, “kita hindari persaingan antar teman kerja kita sehingga hubungan menjadi baik.” Angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

Hindari Persaingan

Skor rata-rata

Harus Bersaing

5.18

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Kepentingan Umum – Kepentingan Pribadi

117. Ada dua pendapat di masyarakat. Pendapat pertama menyatakan “Setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadinya.” Pendapat kedua menyatakan sebaliknya, “setiap orang bebas menentukan yang terbaik bagi dirinya.” Angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

Kepentingan Umum

Skor rata-rata

Kepentingan Pribadi

3.30

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Masy. Diarahkan Negara – Negara Melayani Masy.

119. Ada dua pendapat di masyarakat. Pendapat pertama menyatakan “Masyarakat seperti anak kecil yang harus diarahkan oleh negara.” Pendapat kedua menyatakan “negara adalah pelayan masyarakat, dan masyarakat yang mengontrol pemerintah.” Angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

**Masyarakat
diarahkan negara**

Skor rata-rata

7.66

**Negara melayani
masyarakat**

1

10



SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL :

Konflik harus dihindari – Konflik biasa dalam masyarakat

120. Ada dua pendapat di masyarakat. Pendapat pertama menyatakan “Konflik atau pertentangan harus semaksimal mungkin dihindari”. Pendapat kedua menyatakan “konflik atau pertentangan adalah sesuatu yang biasa dalam masyarakat.” Angka 1 menunjukkan semakin pro dengan pendapat pertama, dan angka 10 menunjukkan semakin pro dengan pendapat kedua. Di mana ibu/bapak meletakkan sikap ibu/bapak sendiri dalam masalah ini?

**Konflik harus
dihindari**

Skor rata-rata

3.11

**Konflik biasa dalam
masyarakat**

1

10

SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL: Ringkasan

	Nilai agama – kebebasan individu	Ramah lingkungan - Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Pajak – Mengurangi Pajak	Pemerataan Pendapatan – Bekerja lebih keras lebih banyak pendapatan	Hukum dan keteraturan – Kebebasan Sipil	Negara tetap memiliki perusahaan – Menjual perusahaan Negara Kepada Rakyat	Hindari Persaingan – Harus bersaing	Kepentingan Umum – Kepentingan Pribadi	Masy. Diarahkan Negara – Negara Melayani Masy.	Konflik harus dihindari – Konflik biasa dalam masyarakat
GENDER										
Laki-laki	3.9	4.8	4.1	6.1	3.3	3.5	5.5	3.1	7.7	3.1
Perempuan	3.8	4.6	4.3	6.4	3.3	3.4	4.8	3.5	7.6	3.2
DESA-KOTA										
Pedesaan	3.8	4.7	4.3	6.0	3.3	3.5	4.9	3.2	7.8	3.1
Perkotaan	3.9	4.7	4.1	6.6	3.2	3.2	5.6	3.4	7.4	3.2
USIA										
<=19 tahun	4.2	4.4	3.6	6.2	3.8	3.3	5.2	2.9	7.7	3.5
20-29 tahun	4.1	4.8	3.8	6.2	3.3	3.2	5.1	3.4	7.5	3.3
30-39 tahun	3.8	4.7	4.3	6.3	3.3	3.5	5.3	3.2	7.6	3.1
40-49 tahun	3.7	4.9	4.4	6.2	3.3	3.4	5.1	3.5	7.8	3.1
>= 50 tahun	3.7	4.6	4.2	6.3	3.2	3.6	5.2	3.2	7.7	2.9
PENDIDIKAN										
<=SD	3.7	4.9	4.6	6.1	3.4	3.4	4.5	3.6	7.8	3.0
SLTP	3.6	4.5	4.0	6.4	3.3	3.5	5.2	3.2	7.4	3.2
SLTA	4.1	4.7	3.7	6.1	3.3	3.2	5.9	2.9	7.6	3.2
Kuliah	4.5	4.5	3.7	6.5	3.2	3.6	6.8	2.8	7.9	3.2

SIKAP KOMUNAL-INDIVIDUAL: Ringkasan

	Nilai agama – kebebasan individu	Ramah lingkungan - Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Pajak – Mengurangi Pajak	Pemerataan Pendapatan – Bekerja lebih keras lebih banyak pendapatan	Hukum dan keteraturan – Kebebasan Sipil	Negara tetap memiliki perusahaan – Menjual perusahaan Negara Kepada	Hindari Persaingan – Harus bersaing	Kepentingan Umum – Kepentingan Pribadi	Masy. Diarahkan Negara – Negara Melayani Masy.	Konflik harus dihindari – Konflik biasa dalam masyarakat
PENDAPATAN										
< Rp. 400.000	3.7	4.9	4.6	6.1	3.5	3.7	4.3	3.6	7.8	3.3
Rp. 400.000 - < 1 Jt	3.8	4.7	4.3	6.0	3.4	3.4	5.2	3.3	7.6	3.2
>= Rp. 1 Jt	3.9	4.6	3.7	6.6	3.1	3.2	5.9	3.1	7.6	2.9
AGAMA										
Islam	3.7	4.8	4.2	6.3	3.3	3.4	5.1	3.4	7.6	3.1
Non Islam	4.6	4.0	4.0	5.9	3.1	3.7	5.5	2.9	7.8	2.9
WILAYAH										
SUMATERA	3.5	4.2	4.1	6.1	3.0	3.6	5.4	3.1	7.4	2.6
DKI+BANTEN	4.4	4.7	3.8	6.3	3.6	3.5	5.0	3.2	8.2	3.4
JABAR	3.2	5.0	4.8	6.7	3.4	3.3	5.5	4.0	7.9	3.3
JATENG+DIY	4.7	4.9	4.3	6.0	3.4	3.6	5.4	3.4	7.1	3.5
JATIM+BALI	3.6	4.8	4.1	5.8	3.1	2.9	4.9	3.1	7.8	3.2
SULAWESI	3.9	4.7	3.9	7.0	3.3	3.2	4.6	2.7	7.9	3.2
KALIMANTAN	3.7	4.4	2.8	7.0	3.2	3.3	5.1	2.7	7.9	2.3
LAINNYA	4.3	5.5	4.4	5.7	4.1	4.4	4.7	3.3	7.5	3.4

TEMUAN

- Sikap komunal yang ditandai oleh kuatnya komitmen terhadap institusi sosial cukup merata dipegang masyarakat. Faktor jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pendapatan hampir-hampir tidak berpengaruh. Kalaupun terjadi perbedaan dalam variasi faktor demografis, nilainya sangat kecil dan di bawah angka 1 dari rentang 10. Satu pengecualian terjadi pada faktor pendidikan dan pendapatan. Mereka yang berpendidikan rendah dan yang berpendapatan rendah cenderung untuk menghindari persaingan. Perbedaan sikap mereka dari kalangan yang berpendidikan dan berpendapatan tinggi cukup besar, yakni 1.3 dan 1.6.

TEMUAN (Lanjutan...)

- Ketika kepentingan individu dibenturkan dengan kepentingan masyarakat, negara dan agama, hampir bisa dipastikan responden memilih untuk memomorduakan kepentingan individu. Hal ini tampak jelas dalam sikap mereka yang cenderung memilih tunduk pada tradisi agama, mementingkan keteraturan sosial, menjunjung kepentingan umum dan menghindari konflik dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini, responden juga lebih suka kalau negara tetap mempertahankan kepemilikannya dalam berbagai perusahaan dibanding harus melakukan swastanisasi.

TEMUAN (Lanjutan...)

- Responden cenderung bersikap progresif hanya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan antarindividu dan bukan kepentingan institusi sosial lain. Dalam konteks ini, mereka cukup bisa menerima jika individu yang bekerja lebih keras mendapat penghargaan lebih, atau keharusan munculnya persaingan pada tingkat individu.